

ABSTRAK

Camelya Bella Saputri. 2026. *Analisis Yuridis terhadap Faktor-Faktor Pemberian Persetujuan Istri pada Permohonan Izin Poligami Berdasarkan Penetapan-Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025*. Skripsi. Program Studi Hukum, FH, UNIVERSITAS PGRI MADIUN. Pembimbing (I) Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian persetujuan istri dalam permohonan izin poligami serta menganalisis pemenuhan hak-hak normatif istri dalam penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025. Poligami merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan secara terbatas dalam hukum Indonesia dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adanya persetujuan dari istri. Dalam praktiknya, persetujuan tersebut tidak selalu lahir dari kehendak bebas, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun psikologis sehingga perlu dikaji dari perspektif yuridis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan serta penelaahan terhadap penetapan-penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian persetujuan istri dalam permohonan izin poligami meliputi faktor ekonomi, faktor religius, faktor sosial dan budaya, faktor psikologis, serta pertimbangan menjaga keutuhan rumah tangga. Dari perspektif yuridis, persetujuan istri memiliki kedudukan penting sebagai syarat substantif dan administratif dalam permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan hak-hak normatif istri dalam penetapan izin poligami pada umumnya telah dipertimbangkan oleh hakim melalui pemeriksaan kemampuan suami dalam memberikan nafkah, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak istri dan anak.

Kata Kunci : Persetujuan Istri, Izin Poligami, Perlindungan Hukum, Hak-Hak Normatif Istri, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

ABSTRACT

Camelya Bella Saputri. 2026. A Juridical Analysis Of Factors Influencing A Wife's Consent To A Polygamy Permit Application (Case Study: Religious Court Ruling In Madiun Regency, 2025). Skripsi. Law Departmen, UNIVERSITAS PGRI MADIUN. Advisor (I) Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

This study aims to analyze the factors underlying a wife's consent in polygamy permit applications and to examine the fulfillment of a wife's normative rights in polygamy permit rulings issued by the Madiun Regency Religious Court in 2025. Polygamy is a form of marriage permitted under Indonesian law only within specific limits and subject to certain conditions, one of which is the wife's consent. In practice, such consent does not always stem from free will but may be influenced by social, economic, cultural, or psychological factors, necessitating an analysis from a juridical perspective. This research employs a normative legal research method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through literature reviews and an examination of polygamy permit rulings issued by the Madiun Regency Religious Court in 2025. The findings indicate that the factors underlying a wife's consent include economic, religious, socio-cultural, and psychological factors, as well as considerations regarding the preservation of household integrity. From a juridical perspective, the wife's consent holds a crucial position as both a substantive and administrative requirement for polygamy permit applications, as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law. The study also finds that the fulfillment of a wife's normative rights in polygamy permit rulings is generally taken into account by judges through the assessment of the husband's ability to provide financial support, ensure fairness, and protect the rights of the wife and children.

Keywords: *Wife's Consent, Polygamy Permit, Legal Protection, Wife's Normative Rights, Madiun Regency Religious Court*